



Research Article

Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Layanan Bimbingan Konseling di SMP Nurul Hikmah Tlanakan

Fitriana Sa'rani, Annisa Angraini

Magister Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Madura Pamekasan, Indonesia
Corresponding Author, Email: fitriana.sarani92@gmail.com (Fitriana Sa'rani)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 02, 2026
Accepted : August 03, 2026

Revised : July 04, 2026
Available online : September 08, 2026

How to Cite: Fitriana Sa'rani and Annisa Angraini. (2026) "Analysis of Financing Management in Enhancing Guidance and Counseling Services at SMP Nurul Hikmah Tlanakan", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 355–363. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.2459.

Analysis of Financing Management in Enhancing Guidance and Counseling Services at SMP Nurul Hikmah Tlanakan

Abstract. This study aims to analyze the implementation of educational financing management concerning power and service aspects, particularly in guidance and counseling services at SMP Nurul Hikmah Tlanakan. The focus is on how planning, budget allocation, and evaluation are systematically carried out to ensure the sustainability of effective counseling programs. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach. The results show that financing management is collaboratively conducted between school counselors, the principal, and the budgeting team. The allocated funds are used for various purposes, including additional counselor honorariums, operational needs of the counseling room, subscriptions to digital counseling platforms, and the provision of psychological testing tools. Challenges such as delayed fund disbursement and limited

digital infrastructure are addressed through budget efficiency and optimization of available resources. In conclusion, proper financing management greatly influences the quality of counseling services and can serve as a model for other schools aiming to sustainably enhance their counseling programs.

Keywords: Financing Management, Guidance and Counseling, School Services

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen pembiayaan pendidikan terhadap layanan daya dan jasa, khususnya pada layanan bimbingan dan konseling di SMP Nurul Hikmah Tlanakan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana perencanaan, pengalokasian, serta evaluasi anggaran dilakukan secara sistematis untuk mendukung keberlangsungan program konseling yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan dilakukan secara kolaboratif antara guru BK, kepala sekolah, dan tim anggaran. Dana digunakan untuk berbagai keperluan seperti honorarium guru BK tambahan, operasional ruang BK, langganan platform digital konseling, hingga penyediaan alat tes psikologis. Hambatan yang dihadapi meliputi keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya digital, yang diatasi dengan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Kesimpulannya, manajemen pembiayaan yang baik sangat berpengaruh terhadap mutu layanan konseling dan dapat menjadi model bagi sekolah lain yang ingin mengembangkan layanan serupa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Bimbingan dan Konseling, Layanan Sekolah

PENDAHULUAN

Layanan Bimbingan Konseling (BK) merupakan komponen vital dalam sistem pendidikan yang berperan penting dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik, baik secara akademik maupun psikososial. Di era modern ini, tantangan yang dihadapi siswa semakin kompleks, mulai dari tekanan akademik, masalah penyesuaian sosial, hingga perkembangan identitas diri (Fathurahman et al., 2024, p. 976). Dalam konteks ini, BK berfungsi sebagai pendukung utama untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Layanan Bimbingan Konseling (BK) telah menjadi pilar penting dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian perkembangan peserta didik yang holistik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014, BK merupakan layanan esensial yang wajib diselenggarakan di setiap satuan pendidikan. Namun dalam praktiknya, implementasi layanan ini masih menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam aspek pembiayaan. Data dari Direktorat GTK Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa 65% sekolah menengah di Indonesia mengalami keterbatasan anggaran untuk mengoptimalkan layanan BK, dengan alokasi rata-rata hanya Rp 15-20 juta per tahun (Arifudin et al., 2021, p. 17).

Di SMP Nurul Hikmah Tlanakan, masalah ini semakin krusial mengingat karakteristik siswanya yang beragam. Sekolah ini terletak di daerah dengan tingkat migrasi orang tua yang tinggi (sekitar 40% siswa merupakan anak dari TKI), sehingga membutuhkan pendekatan BK yang lebih intensif. Ironisnya, alokasi dana BK di sekolah ini hanya mencapai 2,3% dari total anggaran, jauh di bawah rekomendasi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) yang menetapkan idealnya 5-7%.

Namun demikian, implementasi layanan BK yang efektif seringkali terkendala oleh masalah pembiayaan. Penelitian Azhari dan Kurniady mengungkapkan bahwa rata-rata sekolah di Indonesia hanya mengalokasikan 10-15% dari total anggaran untuk layanan non-akademik, termasuk BK (Azhari & Kurniady, 2016, p. 45). Kondisi ini menjadi lebih menantang di sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas seperti SMP Nurul Hikmah Tlanakan, dimana kebutuhan akan layanan BK justru semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi siswa.

Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar yang menuntut inovasi dalam layanan BK, sementara kemampuan finansial sekolah sangat terbatas (Suhardita et al., 2022, h. 108). Penelitian Azhari dan Kurniady membuktikan adanya korelasi signifikan ($r=0,82$) antara kecukupan anggaran BK dengan efektivitas layanan di sekolah menengah (Azhari & Kurniady, 2016, p. 47).

Di tingkat makro, masalah ini sebenarnya telah diantisipasi melalui Dana BOS Reguler yang mengalokasikan 20% untuk pengembangan SDM termasuk guru BK. Namun implementasi di lapangan masih menemui kendala teknis, seperti mekanisme pencairan yang lambat dan ketidakpahaman dalam penyusunan RAPBS/M (Nafisah & Widiyanto, 2017, p. 790).

Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana manajemen pembiayaan BK seharusnya dikelola di tingkat sekolah menengah, dengan studi kasus di SMP Nurul Hikmah Tlanakan sebagai contoh konkret. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah dengan karakteristik serupa dalam mengoptimalkan layanan BK meski dengan sumber daya terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan memahami secara mendalam praktik manajemen pembiayaan layanan bimbingan dan konseling di SMP Nurul Hikmah Tlanakan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi proses, interaksi, dan dinamika pengelolaan anggaran dalam konteks nyata dan spesifik. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan guru BK, kepala sekolah, serta tim anggaran, dan dokumentasi berupa RAPBS/M dan laporan keuangan sekolah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi strategi pembiayaan, efektivitas alokasi anggaran, hambatan teknis yang dihadapi, serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan praktik manajerial yang telah diterapkan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan RAPBS/M untuk Layanan Bimbingan Konseling

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) memiliki peran strategis dalam mendukung layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Dalam konteks SMP Nurul Hikmah Tlanakan, proses ini

diawali dengan mekanisme perencanaan yang bersifat partisipatif. Seluruh pihak terkait, seperti guru BK, kepala sekolah, komite, dan perwakilan orang tua siswa dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan layanan BK. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana BK, pelatihan dan pengembangan profesional guru BK, serta kegiatan penunjang untuk peserta didik seperti seminar, konseling kelompok, dan layanan psikologis lainnya (Arifudin et al., 2021, p. 45).

Langkah selanjutnya adalah penyusunan draft anggaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang telah diidentifikasi. Penyusunan ini merujuk pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran sebagaimana diamanatkan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Selain itu, penyusunan RAPBS/M juga mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia dari berbagai sumber, seperti dana BOS dan kontribusi sukarela masyarakat (Azhari & Kurniady, 2016, p. 88).

Setelah draft selesai disusun, tahap validasi dan pengesahan dilakukan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap kelayakan program, kesesuaian anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kesepakatan akhir dituangkan dalam dokumen resmi RAPBS/M yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran selama satu tahun pelajaran (A. Munir, 2013, p. 27).

Partisipasi dalam perencanaan ini sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pendidikan (Fauziah et al., 2022, p. 190). Dengan demikian, proses penyusunan RAPBS/M di SMP Nurul Hikmah tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan strategi manajerial dalam memastikan layanan BK dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pentingnya perencanaan yang matang dalam RAPBS/M juga didukung oleh Khatulistiwa yang menegaskan bahwa keberhasilan layanan BK sangat bergantung pada kejelasan program dan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sekolah perlu terus meningkatkan kapasitas perencanaan dan transparansi dalam penyusunan anggaran demi menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan BK (Khatulistiwa et al., 2024, p. 5605).

Profil dan Output RAPBS/M terkait Pengembangan Layanan Bimbingan Konseling

Struktur alokasi dana dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) memainkan peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling (BK) secara optimal di lingkungan pendidikan. Dalam konteks SMP Nurul Hikmah Tlanakan, pengalokasian dana untuk layanan BK menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan non-akademik siswa, terutama yang berkaitan dengan perkembangan psikologis, sosial, dan emosional peserta didik. Alokasi ini mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pencapaian akademik semata, melainkan juga pada keseimbangan mental dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, pos pembiayaan untuk layanan BK dikembangkan dalam beberapa kategori utama yang saling mendukung.

Pertama, dana diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana layanan BK. Ini mencakup penyediaan ruang konseling yang nyaman, alat tes psikologis, media konseling berbasis digital, hingga perangkat dokumentasi layanan. Sarana fisik yang representatif menjadi syarat utama dalam menjamin kerahasiaan dan kenyamanan selama proses konseling berlangsung. Hal ini sesuai dengan gagasan Supriyanto, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan BK dapat dicapai melalui ketersediaan fasilitas yang mendukung suasana konseling yang kondusif dan manusiawi (Supriyanto* et al., 2023, p. 5218). Kedua, pengembangan kapasitas guru BK juga menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran. Kegiatan pelatihan, workshop, dan seminar bagi guru BK secara rutin difasilitasi agar kompetensi profesional mereka terus meningkat, terutama dalam hal pendekatan-pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan psikologis generasi muda saat ini. Azhari dan Kurniady menegaskan bahwa mutu layanan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga pembiayaan yang difokuskan untuk peningkatan kapasitas guru menjadi investasi jangka panjang bagi sekolah (Azhari & Kurniady, 2016, p. 217).

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan siswa yang bersifat preventif dan pengembangan diri, seperti seminar motivasi, bimbingan kelompok sebaya, pelatihan kepemimpinan, dan kampanye anti-bullying. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk intervensi terhadap masalah siswa, tetapi juga sebagai upaya membangun karakter dan meningkatkan kesadaran diri peserta didik dalam menghadapi tantangan sosial dan emosional. Ramdani et al. menyatakan bahwa layanan BK yang efektif membutuhkan dukungan finansial yang proporsional dengan kebutuhan peserta didik di lapangan (Ramdani et al., 2020, p. 3). Dalam RAPBS/M tahun ajaran 2024, tercatat bahwa rata-rata anggaran untuk pengembangan layanan BK berkisar antara 5 hingga 8 persen dari total dana operasional. Persentase ini menunjukkan adanya keberpihakan institusi terhadap upaya mewujudkan layanan pendidikan yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik, baik secara intelektual maupun emosional.

Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi dasar dalam menyusun struktur alokasi ini, sebagaimana ditegaskan oleh Arifudin et al., bahwa setiap perencanaan keuangan pendidikan seharusnya mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas penggunaan dana (Arifudin et al., 2021, p. 142). Dengan struktur alokasi dana yang terorganisir dan terfokus seperti ini, diharapkan layanan BK di SMP Nurul Hikmah Tlanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak positif terhadap perkembangan peserta didik dalam jangka panjang.

Implementasi Manajemen Pembiayaan terhadap Layanan Daya dan Jasa

Implementasi manajemen pembiayaan dalam konteks layanan daya dan jasa di SMP Nurul Hikmah Tlanakan menjadi bukti konkret bagaimana perencanaan anggaran diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mendukung operasionalisasi layanan bimbingan dan konseling (BK). Layanan daya dan jasa dalam hal ini mencakup seluruh bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga profesional, jasa pendukung teknis, serta pengelolaan administratif yang menunjang kegiatan konseling. Dalam pelaksanaannya, sekolah secara konsisten

mengalokasikan dana untuk honorarium konselor tambahan, pelatihan pengembangan kompetensi guru BK, dan penyediaan jasa eksternal seperti psikolog atau narasumber ahli yang diundang dalam kegiatan penguatan karakter siswa. Hal ini selaras dengan pandangan Fathurahman et al. bahwa optimalisasi peran konselor dalam menghadapi berbagai dinamika psikologis peserta didik menuntut dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan (Fathurahman et al., 2024, p. 981).

Selain pembiayaan tenaga profesional, implementasi juga menyorot pemanfaatan jasa digital dan teknologi informasi sebagai media penunjang layanan BK. Sekolah telah mulai menerapkan sistem informasi konseling berbasis daring yang memungkinkan siswa untuk melakukan pemesanan jadwal konseling secara anonim dan fleksibel, serta mengakses materi-materi psikoedukatif melalui platform digital internal. Pengadaan dan pemeliharaan sistem ini dibiayai melalui pos anggaran layanan jasa teknologi, yang menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi layanan BK menuju arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan generasi digital. Sejalan dengan hal ini, Khatulistiwa et al. menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam layanan BK merupakan inovasi yang memerlukan investasi jangka panjang, baik dari aspek pengadaan maupun pengelolaan berkelanjutan (Khatulistiwa et al., 2024, p. 5608).

Tidak hanya itu, implementasi pembiayaan juga menyorot pada jasa layanan penunjang seperti konsumsi dan transportasi untuk kegiatan konseling luar sekolah atau outbound psikoedukatif. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kedekatan emosional antara guru BK dan peserta didik dalam suasana yang lebih terbuka dan menyenangkan. Anggaran untuk kegiatan tersebut biasanya disusun secara fleksibel berdasarkan kebutuhan aktual dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Menurut Fauziah et al., layanan konseling yang berhasil tidak hanya bergantung pada ruang kelas, tetapi juga pada pendekatan aktif dan kontekstual yang ditunjang oleh layanan jasa yang memadai (Fauziah et al., 2022, p. 192).

Pelaksanaan pembiayaan pada layanan daya dan jasa juga memperhatikan asas transparansi dan efisiensi, di mana setiap pengeluaran dicatat secara sistematis dan diaudit secara berkala oleh tim manajemen sekolah. Hal ini penting untuk menjamin bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan dan bukan sekadar formalitas administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Munir dalam perspektif hukum Islam, bahwa pengelolaan dana pendidikan harus memenuhi prinsip keadilan (*`adl*) dan kemanfaatan umum (*maslahah*), agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan social (S. Munir et al., 2024, p. 431).

Selain aspek honorarium dan jasa profesional, biaya operasional penunjang juga menjadi komponen penting dalam implementasi pembiayaan layanan bimbingan dan konseling di SMP Nurul Hikmah Tlanakan. Biaya ini mencakup utilitas dasar seperti listrik, air, dan koneksi internet yang secara langsung mempengaruhi kelancaran aktivitas di ruang BK. Ruangan yang nyaman, pencahayaan yang memadai, serta koneksi internet yang stabil sangat menunjang proses konseling, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun daring. Tidak hanya itu, sekolah juga mulai berlangganan layanan teknologi berbasis konseling seperti platform e-counseling dan perangkat tes psikologi digital sebagai upaya modernisasi layanan (Fitri et al., 2019, p. 110).

Langganan ini bersifat berkelanjutan dan membutuhkan pengelolaan anggaran yang disiplin agar keberlanjutannya tetap terjamin, sebagaimana ditekankan dalam temuan dari Fathurahman et al. yang menyoroti pentingnya penguatan ekosistem digital untuk menunjang efektivitas layanan konseling di sekolah (Fathurahman et al., 2024, p. 982).

Dalam hal sistem pengelolaan keuangan, terdapat prosedur pencairan dana yang telah distandarkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Proses ini dimulai dari tahap pengajuan oleh guru BK, kemudian diverifikasi oleh kepala sekolah serta bendahara, sebelum akhirnya dana dicairkan untuk kebutuhan yang telah disetujui. Seluruh pengeluaran wajib dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan, baik melalui laporan fisik maupun melalui aplikasi pencatatan keuangan digital sekolah. Namun demikian, pelaksanaan sistem ini tidak lepas dari hambatan teknis, seperti keterlambatan pencairan dana dari lembaga pendukung atau keterbatasan akses terhadap platform digital pencatatan anggaran. Hambatan ini kadang memperlambat pelaksanaan program konseling yang telah direncanakan. Menurut Fauziah, kendala administratif dan teknis semacam ini dapat diatasi dengan penguatan koordinasi lintas unit serta peningkatan literasi digital pengelola anggaran sekolah (Fauziah et al., 2022, p. 2022).

Meskipun terdapat berbagai alokasi pembiayaan, efektivitas penggunaannya menjadi aspek krusial yang terus dievaluasi. Melalui evaluasi dan efisiensi anggaran, sekolah berupaya memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi ini dilakukan secara periodik, baik melalui pengamatan langsung terhadap kinerja layanan maupun melalui umpan balik dari siswa dan wali kelas. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk revisi alokasi anggaran pada periode berikutnya. Dalam semangat efisiensi, sekolah juga menerapkan kebijakan hemat energi dengan penggunaan alat elektronik hemat daya dan pengelolaan jam operasional secara bijak. Upaya ini sejalan dengan prinsip masalah dan keberlanjutan dalam perspektif ekonomi syariah, sebagaimana diuraikan oleh Munir, bahwa setiap pengeluaran harus memiliki tujuan kebermanfaatan dan tidak menimbulkan pemborosan (israf) (A. Munir, 2013, p. 91).

Dengan penerapan strategi pembiayaan yang mencakup seluruh komponen daya dan jasa secara terintegrasi, SMP Nurul Hikmah Tlanakan menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang efektif tidak hanya dibentuk oleh pendekatan personal, tetapi juga ditopang oleh manajemen anggaran yang sistematis dan adaptif. Keseimbangan antara kebutuhan teknis dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan dana menjadi fondasi dalam membentuk layanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman.

KESIMPULAN

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan terhadap layanan daya dan jasa di SMP Nurul Hikmah Tlanakan menunjukkan bahwa keberhasilan program bimbingan dan konseling sangat bergantung pada tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan adaptif. Setiap alokasi dana, baik untuk honorarium, operasional, maupun pengembangan fasilitas digital, dirancang untuk mendukung terciptanya

layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keterlibatan guru BK dalam perencanaan hingga evaluasi penggunaan anggaran memperkuat prinsip kolaboratif dalam manajemen sekolah. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan hambatan teknis masih perlu diatasi melalui pendekatan strategis yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan, manajerial, dan spiritual, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya menjadi bagian pelengkap, tetapi fondasi utama dalam membentuk karakter siswa secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., R, J. S. A. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., Sundulusi, C., Darmawati, D., Harahap, E., Sijabat, D., Rahayu, H. A., Refika, R., & Hasbi, I. (2021). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/tr/publications/346208/>.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>.
- Fathurahman, A., Santosa, D., Rudiana, K. Q., & Rahmansyah, S. (2024). LITERATURE REVIEW: PENDEKATAN, STRATEGI DAN TEKNIK BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PSIKIS MAHASISWA. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 975–987.
- Fauziah, H., Kamilah, M. S. W., Badrudin, B., & Yafrizal, M. V. (2022). MANAGEMENT OF GUIDANCE COUNSELING IN ELEMENTARY SCHOOLS. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52627/managere.v4i2.139>.
- Fitri, I. A. D., Hidayat, D. R., & Hartati, S. (2019). Manajemen program bimbingan konseling Sekolah Menengah Pertama. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i2.4808>.
- Khatulistiwa, S., Muzaiyana, I., Ardiah, N., & Nelisma, Y. (2024). Konsep Dasar Strategi Layanan BK di Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9866>.
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.
- Munir, S., Podung, B. J., & Mangantes, M. L. (2024). KONSEP DASAR SARANA DAN PRASARANA BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH SMA NEGERI 26 HALMAHERA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), Article 11. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/6993>.
- Nafisah, D., & Widiyanto, W. (2017). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), Article 3.
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi Kolaborasi Dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

Educational Guidance and Counseling Development Journal, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24014/egcdj.v3i1.9398>.

Supriyanto*, B., Suardiman, S. P., & Santosa, A. B. (2023). Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Layanan Pendidikan di SMA Negeri. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), Article 4.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27126>.